

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I

Dr. K.A Bukhari, M.Pd.I.

Amir Hamzah, M.Pd.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA
DI PERGURUAN TINGGI**

Penulis : Prof. Dr. Ahmad Zainuri, M.Pd.I
Dr. K.A Bukhari, M.Pd.I.
Amir Hamzah, M.Pd.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Yuni Aprilia

Diterbitkan Oleh:
UIN Raden Fatah Press
Anggota IKAPI (No. Anggota 004/SMS/2003)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp: (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : November 2024
15,5 x 23 cm
vi, 83 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-250-463-9

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, berkat rahmat kesehatan dan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, Pencipta langit, bumi dengan segala isinya, serta menjadikan manusia sebagai khalifah di dalamnya. Atas rahmat Allah juga akhirnya Buku ini bisa diselesaikan meski masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Shalawat berangkai salam dihaturkan juga kepada Rasulullah Saw, Kekasih Allah yang menjadi panutan dan pedoman utama bagi seluruh umat manusia sampai hari kebangkitan. Begitu juga dengan keluarga, para sahabat dan semua umatnya, semoga senantiasa berada dalam naungan dan perlindungan Allah Swt, Amin.

Buku ini dimaksudkan sebagai pemberi inspirasi, motivasi, dan kepercayaan diri bahwa setiap pengelola pendidikan tinggi mampu menyusun kurikulum dalam tingkat dan kapasitas masing-masing. Walaupun masih banyak kekurangan diharapkan dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermanfaat menuju pendidikan berkualitas. Semoga Buku ini bermanfaat dan memenuhi harapan dari seluruh stakeholders pendidikan tinggi. Beberapa referensi lain dapat digunakan dalam penyempurnaan Penyusunan Kurikulum Program Studi.

Buku ini jauh dari sempurna. Saran dan kritikan positif sangat penulis harapkan agar penelitian ini lebih baik dan dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga para pembaca baik dari civitas akademika maupun dari masyarakat umum. Untuk kebaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penelitian ini. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan menjadi amal shaleh di sisi Allah, aamiin.

Wassalam

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Pelaksanaan Pemberlajaran	7
A. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	7
B. Faktor Penghambat	16
C. Cara Mengatasi Masalah Pelaksanaan MBKM	21
D. Konsep Teori yang Relevan.....	26
BAB III Strategi Impelmentasi	63
A. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Stakeholder	63
B. Memilih Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa	68
C. Menetapkan Pengawasan yang Memadai	74
D. Menetapkan Standar Nasional yang Jelas.....	75
Daftar Pustaka	77
Glosarium.....	80
Indeks	82

BAB 1

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah suatu cara yang dilakukan manusia agar bisa bertahan hidup guna bisa beradaptasi pada perubahan zaman yang mana tiap individu memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak (Vhalery, Setyastanto, & Leksono, 2022). Pendidikan ialah bagian terpenting pada kehidupannya manusia sebab haruslah bisa memberikan berbagai perubahan terhadap manusia yang mana salah satu perubahannya ialah pada strata sosial individu yakni hendaknya mereka bisa mengakses pendidikan yang sama dan sifatnya menyeluruh. Agar tujuan nasional pendidikan bisa dilahirkan sebagaimana pada hal memberikan kecerdasan terhadap kehidupan berbangsa maupun pendidikan yang didalamnya lahirlah keadilan sosial, maka haruslah diberikan dukungan dari sistem yang diintegrasikan maupun terbangun secara bersama-sama. (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

Kegiatan mental tersebut terjadi dikarenakan terdapat komunikasi individu dengan lingkungan yang disadarinya. Umumnya, belajar ialah perubahan yang terjadi pada tiap individu setelah dilaluinya pengalaman. Artinya, hal tersebut tidak tumbuh ataupun berkembang pada karakteristik ataupun tubuh orang tersebut sejaknya lahir. Belajar ialah sebuah proses mengubah perilaku baik berkenaan dengan pengetahuan, sikap maupun keterampilan dari adanya Latihan maupun pengalaman. (Nofia, 2020)

Kreativitas maupun inovasi dewasa ini menjadi kata kunci pentingnya dalam memastikan bahwasanya Indonesia melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang mana mahasiswa kini belajarnya diperguruan tinggi hendaknya

dibekali sebagai pendidik yang mempunyai keterampilan maupun ulet. Kebijakannya merdeka-Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ialah rangkaian dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai sarjana yang Tangguh sesuai kebutuhannya, serta mampu menjadi pemimpin dengan tingginya semangat kebangsaannya. (Nizam, <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>).

Tujuan dari adanya program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ialah guna diberikannya peningkatan terhadap kemampuan lulusan baik *hard skills* maupun *soft skills*nya, sehingga mereka siap serta sesuai dengan perkembangannya zaman, mempersiapkan lulusan menjadi pemimpin yang berkepribadian maupun unggul. Berbagai program *experimental learning* dengan jalurnya yang fleksibel harapannya bisa memberikan fasilitas terhadap mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya selaras dengan bakat maupun passionnya. (Sudaryanto, Widayati, & Amalia, 2020)

Pada dasarnya, Kampus merdeka ini konsepnya direncanakan sebagai inovasi pembelajaran guna memperoleh pembelajaran yang berkualitas yang mana dengan adanya kebijakan tersebut Perguruan Tinggi diberikan hak otonomnya. (Lathif, Garnasihd, & kk, 2022).

Pada proses pelaksanaan kurikulum merdeka ini, mahasiswa akan diberikan kesempatan belajar di luar prodi selama 3 semester, termasuk memilih 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus diantaranya Pertukaran pelajar, asistensi mengajar, magang, proyek Penulisan, studi independent, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan kegiatan wirausaha.

Dalam prosesnya implementasi delapan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di luar kampus, Setiap prodi harus mempersiapkan diri dengan menyusun buku panduan untuk delapan kegiatan pembelajaran tersebut. Masing-masing panduan disusun berdasarkan arahan dan terjemahan dari panduan kurikulum MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, serta diselaraskan dengan kurikulum MBKM yang disusun oleh prodi.

Buku panduan 8 model kegiatan belajar di luar kampus disusun agar dapat mempermudah mahasiswa dan perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dipilih sesuai dengan bakat dan minat yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa.

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai wujud dari nilai/spirit yang selanjutnya diwujudkan pada suatu program nyata serta implisit termaktub pada Permendikbudristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 berkenaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada pasal 18 menjelaskan bahwasanya:

1. Beban belajar maupun pemenuhan nasanya untuk mahasiswa program sarjana ataupun program sarjana terapan sesuai yang termaktub dipasal 17 ayat 1 huruf d bisa dijalankan melalui beberapa hal berikut:
 - a. Ikut pada keseluruhan proses pembelajaran yang ada pada program studi diperguruan tinggi selaras dengan masa belajarnya ataupun
 - b. Ikut pada proses pembelajaran yang ada pada program studi guna terpenuhinya Sebagian beban maupun masa belajarnya serta sisanya ikut pada proses pembelajaran diluar program studi yang terdapat pada Pasal 15 ayat 1 & 2.

2. Perguruan tinggi hendaknya memenuhi fasilitas terhadap terlaksananya pemenuhan beban maupun masa belajar pada proses pembelajaran sesuai yang dimaksudkan ayat 1
3. Fasilitasnya perguruan tinggi guna terpenuhinya beban maupun masa belajarnya pada proses pembelajaran sesuai terdapat pada ayat 1 huruf b pada caranya.
 - a. Minimal 4 semester serta maksimalnya 11 semester ialah pembelajaran yang ada pada Program studi
 - b. 20 SKS ataupun setara dengan 1 semester ialah pembelajaran yang berada diluar Program Studi yang ada diperguruan tinggi yang sama, serta
 - c. Maksimal 2 semester ataupun setara 40 SKS yakni:
 - 1) Pembelajaran yang sama diprogram studi yang berbeda perguruan tingginya
 - 2) Pembelajaran yang ada diprogram studi yang memiliki perbedaan dengan perguruan tinggi yang berbeda; serta
 - 3) Membelajaran diluar perguruan tinggi.

Ketentuan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 berkenaan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi ialah peraturan pelaksanaannya dari ketentuan yang terdapat di UU No. 12 Tahun 2012 berkenaan pendidikan tinggi pada pasal 52 ayat 3. Selain menyandarkannya dengan regulasi tersebut mempunyai kaitannya pula dengan berbagai regulasi yang terdapat pada bidang perguruan tinggi seperti *pertama*, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 berkenaan Sistem Pendidikan Nasional; *kedua*, PP No. 4 Tahun 2014 berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; *ketiga*, PP No. 8 Tahun 2012 berkenaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); *keempat*, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.

654/p/2020 berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020; *kelima*, No. 3995 Tahun 2021 berkenaan dengan Pedoman Penetapan Belajar Kampus Merdeka

Aktivitas MBKM ini hendaknya dijalankan dengan adanya Tindakan praktis sebagaimana aktivitas MBKM tersebut sejalan dengan kebutuhan dunia bisnis/praktis serta mengembangkan teoritisnya dari adanya aktivitas MBKM yang selaras dengan perkembangan teoritisnya yang multi dimensi (Pohan, 2022). Pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dasar pemikirannya bermakna kemerdekaan maupun kemandirian terhadap lembaga pendidikan yakni perguruan tinggi negeri ataupun swasta. (Fuadi & Aswita, 2021).

Melalui eratnya komunikasi yang dijalin perguruan tinggi terhadap dunia kerja serta terdapatnya berbagai aktivitas diluar kampus yang memberikan wawasan, pengetahuan maupun pengalaman mahasiswa secara luas, harapannya mahasiswa mempunyai nilai tambah serta bisa bersaing untunk menghadapi berbagai tantangan dimasa depannya. (Puspitasari & Nugroho, 2021).

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mulai dari kurikulum, regulasi dan juga sarana dan prasarana pembelajaran. Permasalahan yang muncul ketika akan diimplementasikan MBKM ini seperti belum dirancangnya kurikulum pada Prodi dalam proses pelaksanaan kurikulum Merdeka, pengetahuan dan sosialisasi yang masih minim, membuat hampir semua prodi belum bersedia melaksanakan ini dalam proses perkuliahan semester

yang akan datang, kemudia regulasi yang akan diterapkan pada perguruan tinggi harus ada dan memiliki kesamaan persepsi juga mata kuliah serta bobot nilai, sehingga mata kuliah tersebut bisa dikonversi ke perguruan tinggi asalnya.

Permasalahan lain yang muncul yakni dalam proses pengambilan mata kuliah, yakni minimal 4 semester dan maksimal 11 semester dalam pembelajaran yang ada di Prodi, mahasiswa banyak yang tidak mengetahui bagaimana proses perkuliahan dengan sistem ini, bahkan dari hasil observasi bahwa mahasiswa menyatakan lebih aman dan nyaman mengambil mata kuliah pada prodi asalnya saja, karena ada kekhawatiran dari mereka bahwa ketidakbisanya pengkonversian mata kuliah di perguruan asing ke perguruan tingginya.

Dari sisi komunikasi juga menjadi masalah, baik berkaitan dengan proses pembelajaran, aturan perkuliahan dan lainnya. Mahasiswa yang mengikuti MBKM harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, walaupun dalam keadaan daring, tetapi ada proses penyesuaian diri bagi mahasiswa dalam proses perkuliahan. Tenaga pendidik juga belum mendapatkan sosialisasi yang maksimal dalam proses pembelajaran MBKM ini, karena ini kalau tidak dilaksanakan sosialisasi yang intensif akan menjadi masalah juga dalam proses implementasi di lapangannya.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERLAJARAN

A. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan ataupun melakukan suatu kegiatan (KBBI). Pelaksanaan dapat juga diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan ialah aktifitas ataupun usaha-usaha yang dilakukan dalam melaksanakan semua rencana serta kebijaksanaan yang telah dirumuskan ataupun ditetapkan dengan dilengkapi berbagai kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa saja yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai maupun bagaimana cara yang harus dalam pelaksanaannya, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program ataupun kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri dari berbagai pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan adalah guna mencapai sasaran dari berbagai program yang ditetapkan semula (Syukur, 1987).

(Siagian, 2003) mengatakan bahwa program ialah rumusan yang dapat membuat gambaran pekerjaan yang akan dilakukan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Perumusan program kerja adalah perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja berwujud berbagai macam bentuk serta kegiatan. Seringkali suatu program mencakup beberapa kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, ataupun sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling

melengkapi, yang mana semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan (Muhaimin dkk, 2009).

Jones dalam (Lubis, Hari and Huseini, 2009) mengemukakan program merupakan suatu cara yang disahkan dalam mencapai tujuan, maupun beberapa karakteristik tertentu yang mana dapat membantu seseorang dalam mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu sebagai berikut :

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya dalam melaksanakan ataupun sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, kadangkala program juga diidentifikasikan melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang mana bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Suatu program yang baik menurut (Tjokroamidjojo, 2000) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- b. Penentuan peralatan yang terbaik dalam mencapai tujuan tersebut.
- c. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten serta proyek yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- d. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan maupun keuntungan yang diharapkan mampu dihasilkan program tersebut
- e. Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan serta program pembangunan lainnya.
- f. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, maupun lainnya untuk melaksanakan program tersebut.

Dengan demikian, dalam menentukan suatu program harus mampu dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari kalangan masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa program ialah serangkaian tindakan maupun aktivitas untuk dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan kebijaksanaan.

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pluralitas. Menurut John Dewey dalam (Hasbullah, 2008) Pendidikan ialah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual serta emosional kearah alam maupun sesama manusia.

Sedangkan (Mudyahardjo, 2016) mendefinisikan pendidikan sebagai suatu kegiatan bimbingan, latihan ataupun pengajaran yang berlangsung seumur hidup dalam mempersiapkan peserta didik memainkan peranannya yang tepat serta konstruktif untuk berbagai lingkungan hidupnya dimasa yang akan datang. Menurut (Azyumardi, 2002) pendidikan merupakan suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan para generasi mudanya dalam menjalankan kehidupan serta untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.

Menurut (Imam, 2002) mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia yang disengaja untuk memimpin angkatan muda mencapai kedewasaan, meningkatkan taraf kesejahteraannya, berada dalam suatu

Pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga jenjang menurut tingkatannya, dimana didalam setiap jenjang mempunyai tujuan yang hendak dicapai (Noviana, 2014). Ketiga jenjang pendidikan tersebut adalah :

- a. Pendidikan dasar, menekankan pada penguasaan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta bernegara. Materi pendidikan dasar mengutamakan pembekaan keampuan yang fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, dengan berbasis pada nilai-nilai moral.
- b. Pendidikan menengah, pendidikan menengah dibedakan menjadi pendidikan menengah umum serta pendidikan menengah kejuruan. Tujuan utama pendidikan menengah umum ialah melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara tujuan utama pendidikan menengah kejuruan ialah mempersiapkan siswa dalam memasuki dunia kerja.
- c. Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi menekankan pada peningkatan mutu serta relevansi, baik untuk program-program yang bersifat akademik ataupun keahlian (profesional).

Gelombang globalisasi membawa masalah-masalah baru dalam proses pendidikan antara lain di satu pihak pemerintah menganggap pendidikan sebagai salah satu tulang punggung utama dari perkembangan masyarakat, di lain pihak campur tangan pemerintah terhadap pendidikan nasional semakin berkurang. Berbagai kebijakan pendidikan yang bemuansa internasional mulai lahir seperti sekolah-

sekolah internasional, sekolah-sekolah bertaraf internasional, pelatihan-pelatihan internasional serta berbagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan misalnya, delapan tujuan dari perkembangan dunia (Milenium Development) menurut PBB yang di kutip dari H.A.R. Tilaar (2008), yaitu :

- a. Penghapusan kemiskinan
- b. Persamaan gender
- c. Pendidikan untuk semua
- d. Perlawanan terhadap penyakit HIV/AIDS, malaria, dan sebagainya.
- e. Penurunan angka kematian anak
- f. Peningkatan kesehatan ibu
- g. Kerjasama Global
- h. Pelestarian lingkungan hidup

Pendidikan menurut UNESCO, meliputi empat pilar, yaitu: "learning to know, learning to do, learning to be", serta "learning to live together". Pendidikan hakekatnya suatu usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang dibutuhkan serta berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui (learning to know) dalam prosesnya tidaklah sekedar mengetahui apa yang bermakna namun juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan.

- a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Merdeka Belajar Kampus merdeka merupakan inovasi dibidang pendidikan yang bergerak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Adapun esensi dari kampus merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centeret Learning*). Kampus merdeka menawarkan tantangan serta kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menggali potensi diri lebih dalam

lagi melalui pengembangan tovasi, kreativitas, kepribadian serta mampu mengembangkan kemandirian dalam melakukan praktek secara langsung di lapangan. Terdapat 4 (empat) pokok kebijakan yang ada di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai berikut:

1) Pembukaan program studi baru

Kebijakan yang pertama adalah pembukaan program studi baru bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terakreditasi A dan B. Selama ini hanya perguruan tinggi negeri yang Badan Hukum (BH) yang bisa membuka program studi baru. Melalui kebijakan tersebut, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk membuka program studi baru jika:

- a) PT Memiliki akreditasi A dan B.
- b) Jika memiliki kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, intitusi multilateral atav universitas Top 100 ranking QS.
- c) Bukan program studi pendidikan dan kesehatan

Melalui kebijakan pokok tersebut maka kemendikbud memberikan arahan yaitu adanya kerjasama dengan organisasi terkait penyusunan kurikulum, praktek kerja dan penempatan kerja. Kementrian akan bekerjasama dengan dengan PT dan program studi untuk melakukan pengawasan.

Arahan untuk pembukaan program studi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C dari BAN PT untuk PT akreditas A dan B.

2) Sistem akreditasi perguruan tinggi Kebijakan pokok yang kedua adalah re akreditasi perguruan tinggi yang

bersifat sukarela bagi PT dan prodi yang sudah siap naik peringkat akreditasi. Berdasarkan kebijakan kampus merdeka untuk akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BAN-PT akan diperbarui secara otomatis selama 5 (lima) tahun sekali.

- 3) Perguruan tinggi berbadan hukum Kebijakan pokok yang ketiga adalah memberikan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (BH). Selama ini hanya PTN akreditasi A yang bisa mengajukan permohonan Badan Hukum namun dikebijakan kampus merdeka PTN dapat mengajukan permohonan Badan Hukum kapanpun apabila sudah merasa siap tanpa ada akreditasi minimum.
 - 4) Hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi Kebijakan pokok selanjutnya adalah memberikan hak belajar selama 3 (tiga) semester terhadap mahasiswa untuk secara sukarela boleh diambil boleh tidak. SKS yang wajib diambil! dari program studi asal adalah sebanyak 5 (lima) semester dari semester yang telah ditentukan sedangkan untuk semester berikutnya boleh diambil di luar program studi dan perguruan tinggi.
- b. Landasan hukum kampus merdeka
- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, standar Penulisan yang berkaitan dengan sistem Penulisan pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI dan Standar pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di

seluruh wilayah NKRI. Standar pendidikan nasional, standar Penulisan dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

- 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan maka diberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Dalam penentuan akreditasi tentunya membutuhkan tahapan yaitu berupa tahapan evaluasi data dan informasi, penetapan peringkat akreditasi serta pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang merupakan Jembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan akreditasi program studi secara mandiri. Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengembangkan akreditasi perguruan tinggi.
- 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru PIN Dalam jalur penerimaan mahasiswa baru PTN tentunya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a) Adil dalam artian pihak perguruan tinggi tetap berfokus pada potensi dan prestasi akademik tanpa memandang agama, ras, suku, jenis kelamin, kondisi

fisik, status sosial, umur dan tingkat kemampuan ekonomi.

- b) Akuntabel pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara terstruktur dan jelas sesuai dengan prosedur.
 - c) Fleksibel dalam artian pelaksanaannya dapat dilakukan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa paling banyak menempuh 2 (dua) kali UTBK.
 - d) efisien melalui pemanfaatan teknologi, pelibatan sumber daya manusia dan fleksibilitas waktu.
 - e) Transparan dalam artian penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan mudah diakses.
- 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Diterbitkan untuk mengatur tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
- c. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Adapun tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka selama 3 semester belajar di luar kampus adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis kampus merdeka merupakan upaya dalam rangka meningkatkan mutu

proses pembelajaran melalui peningkatan profesionalisme calon pendidik, penciptaan suasana belajar yang kondusif serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan mahasiswa terhadap pengambilan keputusan program kampus, yaitu mahasiswa dapat mengambil 3 SKS di luar jadwal perkuliahan di kampus atau lebih tepatnya mengambil program magang di luar kampus dalam rangka peningkatan kapasitas mahasiswa dalam pengenalan dunia nyata di lingkungan masyarakat. Capaian tersebut untuk mewujudkan tantangan masyarakat.

B. Faktor Penghambat

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang menuju kepada penanaman karakter berakhlak mulia. Salah satu untuk menjawab tantangan tersebut adalah lahirnya kebijakan hak belajar bagi mahasiswa di luar program studi (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar pendidikan tinggi). (Mariati, 2021), selain itu masih ada penghambat lain diantaranya:

1. Pemahaman dan Kesadaran Terbatas dari Stakeholder

Pemahaman dan kesadaran terhadap MBKM masih terbatas di kalangan mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam menjalankan program MBKM karena stakeholder tidak memahami konsep dan tujuan program ini dengan baik. Dalam konteks ini, "Merdeka Belajar Kampus Merdeka" adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan mata kuliah yang ingin mereka ambil serta cara pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Namun, penulis menyatakan bahwa masih ada keterbatasan pemahaman tentang program ini di kalangan mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi.

Ketidakhahaman tersebut dapat menghambat pelaksanaan program MBKM secara efektif. Para stakeholder yang terlibat mungkin tidak sepenuhnya tahu bagaimana cara melaksanakan program ini atau bahkan belum memahami tujuan sebenarnya dari konsep "Merdeka Belajar Kampus Merdeka".

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Implementasi program MBKM membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan keuangan yang memadai untuk membangun program yang efektif. Namun, kurangnya sumber daya manusia dan keuangan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Saat ini kreativitas dan inovasi dari sumber daya manusia menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan

menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sesuai Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020, memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya.

Dalam program ini pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga bisa di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa berupa: kegiatan magang di Industri, mahasiswa membangun desa, mengajar di sekolah, pertukaran mahasiswa, Penulisan di lembaga riset, pengembangan kewirausahaan, proyek mandiri, dan proyek kemanusiaan

Implementasi program MBKM bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kurikulum formal serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tenaga kerja profesional atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidangnya. Mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas terkait pengembangan kurikulum,

pembelajaran inovatif, penilaian hasil belajar, serta manajemen administrasi.

Selain itu, aspek keuangan juga merupakan faktor penting dalam implementasi program MBKM. Dibutuhkan anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai aktivitas seperti penyusunan modul pembelajaran baru, perbaikan infrastruktur pendidikan, fasilitas laboratorium dan workshop, pelatihan bagi para pengajar maupun mahasiswa sebagai mentor atau tutor pendamping

Namun sayangnya, ada kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan keuangan yang memadai. Kurangnya jumlah tenaga kerja profesional dengan kompetensi sesuai persyaratan membuat sulit untuk mengeksekusi rencana program secara optimal. Selain itu, anggaran yang terbatas juga dapat membatasi kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan mencapai target program MBKM.

3. Pemilihan Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa

Pemilihan kegiatan dalam program MBKM dapat menjadi masalah jika kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Hal ini dapat mengurangi minat dan partisipasi mahasiswa dalam program ini.

Dalam konteks MBKM, tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kurikulum formal. Namun, jika kegiatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan individu mahasiswa, maka mereka mungkin tidak akan tertarik atau merasa terlibat sepenuhnya.

Pemilihan kegiatan yang tepat sangat penting agar program MBKM dapat berhasil mencapai tujuannya.

Diperlukan penilaian mendalam tentang preferensi dan minat mahasiswa serta pengamatan terhadap tren saat ini dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa pilihan aktivitas yang ditawarkan sesuai dengan harapan dan ekspektasi para peserta.

4. Tidak Adanya Pengawasan yang Memadai

Tidak adanya pengawasan yang memadai dari pihak perguruan tinggi dan pemerintah dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan dana dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan program MBKM. Dalam konteks ini, MBKM adalah sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan jalannya pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa dana atau anggaran yang dialokasikan untuk program ini bisa disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat.

Selain itu, tanpa pengawasan yang efektif, pelaksanaan kegiatan juga bisa menjadi tidak sesuai dengan tujuan program MBKM. Hal ini dapat mengakibatkan dilakukannya aktivitas-aktivitas yang kurang relevan atau bahkan melenceng dari fokus utama program tersebut.

5. Tidak Adanya Standar Nasional yang Jelas

Tidak adanya standar nasional yang jelas dalam pelaksanaan program MBKM dapat menyebabkan perbedaan pelaksanaan dan penilaian program antara satu perguruan tinggi dengan yang lain. MBKM adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah dan mengakses sumber belajar di luar kurikulum formal. Namun, karena tidak ada standar nasional yang jelas mengenai bagaimana program ini harus

dilaksanakan, setiap perguruan tinggi cenderung memiliki pendekatan dan penilaian yang berbeda-beda.

Ketidakjelasan standar nasional ini bisa menjadi masalah karena dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan antara mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mahasiswa dari salah satu universitas mungkin mendapatkan akses ke lebih banyak kesempatan atau beban kerja yang lebih ringan dibandingkan dengan mahasiswa di universitas lain.

C. Cara Mengatasi Masalah Pelaksanaan MBKM

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi faktor penghambat dalam implementasi program MBKM di perguruan tinggi, yaitu:

1. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Stakeholder

Perguruan tinggi dan pemerintah harus meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder, terutama mahasiswa, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi tentang konsep dan tujuan program MBKM melalui sosialisasi, seminar, dan pelatihan karena penting bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang MBKM agar dapat mendukung implementasi program dengan baik. Semakin banyak orang yang benar-benar memahami konsep dan tujuan dari MBKM, semakin lancar pula pelaksanaannya. Mungkin perlu ada upaya komunikasi lebih intensif atau sosialisasi agar semua stakeholder dapat mengerti betul apa itu MBKM dan manfaatnya bagi dunia pendidikan.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya upaya komunikasi intensif atau sosialisasi yang lebih luas agar semua stakeholder benar-benar memahami apa itu MBKM dan manfaatnya bagi dunia pendidikan. Semakin banyak

orang yang memahami konsep dan tujuan dari MBKM, semakin lancar pula pelaksanaan program ini.

Dalam rangka mendukung kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagai contoh adalah Nota Kesepahaman dengan Kementerian BUMN terkait Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang dapat dilakukan mahasiswa selama 1 hingga 2 semester. Hingga saat ini terdapat 118 BUMN yang tergabung dalam Forum *Human Capital* Indonesia, belum termasuk perusahaan-perusahaan lainnya yang telah mengadakan kerjasama dengan Kemdikbud serta perusahaan-perusahaan internasional yang ada di negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan beberapa negara lainnya.

Dalam hal memfasilitasi kemudahan pendaftaran dan pelaporan kegiatan dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Kemdikbud meluncurkan sistem website terintegrasi yang dapat menghubungkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan pemangku kepentingan yang lain yaitu perguruan tinggi, mahasiswa dan juga mitra (dunia usaha, dunia industri, BUMN, dan lembaga lain). Diharapkan peluncuran sistem Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat mempercepat dan mempermudah dalam implementasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Pemerintah perlu memberikan dukungan keuangan dan sumber daya manusia yang memadai kepada perguruan tinggi untuk membangun program yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta perguruan tinggi itu

sendiri, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk mendukung implementasi program MBKM.

Dengan demikian, diharapkan program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan.

Dengan memberikan dukungan ini, diharapkan bahwa program MBKM dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Program MBKM merupakan upaya untuk mendorong mahasiswa agar memiliki fleksibilitas dalam menentukan mata kuliah, mengikuti perkuliahan lintas disiplin ilmu, mengambil kursus online dari luar negeri, magang atau kerja praktik di dunia industri, melakukan riset mandiri atau kewirausahaan. Oleh karena itu, dukungan finansial dan sumber daya manusia yang memadai sangatlah penting agar perguruan tinggi dapat melaksanakan program ini dengan baik.

3. Memilih Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa

Perguruan tinggi perlu memilih kegiatan dalam program MBKM yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi dan survei untuk mengetahui minat dan kebutuhan mahasiswa serta perlu memperhatikan keprihatinan dan preferensi mahasiswa ketika memilih aktivitas dalam program MBKM. Hal ini akan membantu meningkatkan minat serta partisipasi mereka secara aktif demi kesuksesan program ini. Dalam proses pemilihan aktivitas dalam program MBKM,

keprihatinan dan preferensi mahasiswa juga perlu diperhatikan secara serius. Pihak perguruan tinggi harus memastikan bahwa pilihan kegiatan yang ditawarkan dalam program ini dapat mengakomodasi aspirasi serta harapan-harapan mahasiswa.

Melibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas MBKM akan membantu meningkatkan minat serta partisipasi mereka secara aktif. Dengan merasa didengarkan dan memiliki andil dalam penentuan jalannya program, para mahasiswa akan lebih termotivasi untuk terlibat sepenuhnya demi kesuksesan implementasi dari konsep "merdeka belajar" di lingkungan kampus. Jadi intinya, perguruan tinggi perlu melibatkan konsultasi, survei, serta memperhatikan keprihatinan dan preferensi mahasiswanya saat memilih aktivitas dalam program MBKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat serta partisipasi aktif dari para mahasiswa demi kesuksesan pelaksanaan konsep "merdeka belajar" di kampus.

4. Menetapkan Pengawasan yang Memadai

Pemerintah dan perguruan tinggi perlu menetapkan pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan program MBKM untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan program serta pentingnya adanya pengawasan yang baik dari pihak perguruan tinggi dan pemerintah menjadi sangat jelas.

Pengawasan ini harus mampu memastikan bahwa dana-dana terkait dengan program MBKM digunakan secara benar dan efisien serta aktivitas-aktivitas dilakukan sesuai dengan tujuannya agar manfaat maksimal dari program ini dapat dirasakan oleh seluruh peserta. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk bekerja

sama dalam melakukan pengawasan yang ketat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam pelaksanaan program MBKM. Dengan demikian, diharapkan bahwa setiap anggaran dan sumber daya yang dialokasikan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi mencapai hasil optimal bagi peserta program MBKM. Jadi intinya adalah perlunya pengawasan yang adekuat dalam implementasi program MBKM agar dana digunakan secara tepat sasaran dan aktivitas-aktivitas dilakukan sesuai tujuan demi memberikan manfaat maksimal kepada pesertanya.

5. Menetapkan Standar Nasional yang Jelas

Pemerintah perlu menetapkan standar nasional yang jelas dalam pelaksanaan program MBKM untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan program di seluruh perguruan tinggi. Dengan adanya standar nasional yang jelas, setiap perguruan tinggi akan memiliki panduan yang sama dalam melaksanakan program MBKM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dari program tersebut tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi mahasiswa serta institusi pendidikan.

Standar nasional juga membantu dalam menjaga keseragaman pengalaman belajar para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Dengan begitu, setiap mahasiswa memiliki akses ke peluang-peluang pembelajaran yang serupa dan berkualitas tanpa memandang tempat mereka kuliah. Pemerintah haruslah berperan aktif dalam menyusun standar-standar ini serta melakukan pemantauan terhadap implementasinya. Hal ini bertujuan agar tidak ada perbedaan besar antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dalam hal pelaksanaan program MBKM. Jadi, intinya pemerintah harus menetapkan standar nasional yang jelas

untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan program MBKM di seluruh perguruan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada prinsipnya memiliki empat point penting yaitu kemudahan dalam pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi, kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan memberikan hak belajar mahasiswa di luar kampus.

D. Konsep Teori yang Relevan

Karakteristik Program MBKM, yakni mahasiswa memiliki hak untuk ikut maupun tidak dalam program MBKM yang ditawarkan. Aturan tersebut sejalan dengan permendikbud No. 3 Tahun 2020 berkenaan Standar Nasional Pendidikan, pemenuhan beban maupun masa belajar untuk mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan bisa dijalankan dengan beberapa caranya berikut:

1. Ikut pada semua proses pembelajaran dari program studi diperguruan tinggi selaras dengan masa belajarnya; ataupun
2. Ikut pada proses pembelajaran deprogram studi guna terpenuhinya Sebagian dari beban maupun massa belajar serta ikut pada proses pembelajaran yang ada diluar program studinya.

Adapun persyaratan umum yang wajib dipenuhi mahasiswa untuk bisa ikut program MBKM yakni:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada , dimulai sejak angkatan 2021.
2. Minimal telah menyelesaikan perkuliahan semester 4 (empat) dan program merdeka belajar dimulai pada Semester 5 (lima).

3. Memiliki nilai IPK terakhir minimal 3,25 bagi mahasiswa yang melaksanakan program dalam UIN Raden Fatah, memiliki IPK 3,5 yang akan melaksanakan keluar UIN Raden Fatah.
4. Mengajukan permohonan untuk ikut pada program tersebut paling lambat selama 1 semester sebelum dimulainya program, kepada Ketua Program Studi masing-masing dengan diketahui dosen PA masing-masing.
5. Berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi.
6. Program studi yang dituju harus terakreditasi minimal sama dengan program studi asal.
7. Lembaga atau instansi yang dituju dalam pelaksanaan Kampus Merdeka harus sudah memiliki MoU dengan UIN Raden Fatah.
8. Persyaratan khusus diatur oleh Fakultas masing-masing sesuai karakteristik masing-masing program studi (Penyusun, 2021, pp. 4-5)

Terdapat 8 program MBKM yang bisa mahasiswa ikuti yakni 1) Membangun Desa/KKN Tematik; 2) Proyek/studi independent; 3) Kegiatan wirausaha; 4) Proyek kemanusiaan; 5) Riset/Penulisan; 6) Asisten mengajar disatuan pendidikan; 7) Praktik kerja/magang; 8) Pertukaran pelajar (Penyusun, 2021, p. 9)



Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK,

tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika Masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan MBKM pada Perguruan Tinggi ada beberapa pihak terkait terhadap proses pelaksanaan dan beberapa lini yang memiliki peran dalam persiapan pelaksanaan MBKM tersebut, mulai dari Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi dan juga Mitra.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b. Fakultas

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan tinggi, yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini memberi wewenang kepada perguruan tinggi untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengambil mata kuliah di luar program studi mereka, dengan batasan waktu dan SKS tertentu. Hal ini mengindikasikan upaya untuk memperluas

fleksibilitas dan memungkinkan pembelajaran lintas prodi. Fakultas dan program studi juga diminta untuk bersiap dengan menyusun fasilitasi, dokumen kerja sama dengan mitra, dan menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka. Mahasiswa sendiri dituntut untuk aktif merencanakan, mendaftar, dan melengkapi persyaratan untuk kegiatan luar prodi. Dokumen kerja sama dengan mitra menyoroti kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pihak eksternal, yang dapat memperluas pengalaman belajar. Keseluruhan, data ini mencerminkan perubahan penting dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penekanan pada partisipasi mahasiswa, kerjasama lintas sektor, dan fleksibilitas dalam pembelajaran.

1. Landasan Penyusunan Kurikulum

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis, berikut ini penjelasannya secara rinci:

1. Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).
2. Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein &

Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Berkaitan dengan hal ini Ascher dan Heffron (2010) menyatakan bahwa kita perlu memahami pada kondisi seperti apa justru globalisasi memiliki dampak negatif terhadap praktik kebudayaan serta keyakinan seseorang sehingga melemahkan harkat dan martabat manusia? Lebih jauh disampaikan pula oleh mereka bahwa kita perlu mengenali aspek kebudayaan lokal untuk membentengi diri dari pengaruh globalisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Plafreyman (2007) yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan menjadi topik hangat di kalangan civitas academica di berbagai negara dimana perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri.

Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol

diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration) (Caliguri, 2012). Konsep ini kiranya sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantoro dalam konsep “Tri- Kon” yang dikemukakan di atas.

3. Landasan psikologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976:200); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.
4. Landasan historis, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di

era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

5. Landasan yuridis, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan

Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data,

literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Rumusan kemampuan pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-Dikti rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-Dikti, CPL

terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.

Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan menulis, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapny mengacu pada delapan (8) Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penulisan, dan delapan (8) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan MBKM dengan mekanisme mengakui hak belajar mahasiswa hingga tiga semester di luar program studi (PS) Sarjana Terapan bertujuan untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang belum dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi Industri 4.0 yang sangat disruptif, melalui peningkatan

Dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), regulasi mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas mata kuliah, yang dimana mahasiswa dapat memilih mata kuliah dari program studi yang berbeda dan menggabungkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk lebih bebas dalam menentukan mata kuliah yang ingin diambil. Mereka tidak terbatas hanya pada program studi tertentu, tapi bisa memilih mata kuliah dari program studi lain juga. Misalnya, seorang mahasiswa jurusan Ekonomi bisa mengambil beberapa mata kuliah dari jurusan Teknik atau Psikologi jika mereka tertarik dan melihat manfaatnya bagi perkembangan diri mereka.

Dengan adanya fleksibilitas ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan lintas disiplin ilmu. Mereka dapat menggabungkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan minat pribadi dan kebutuhan masa depan mereka. Contohnya, seorang mahasiswa yang ingin menerapkan prinsip desain grafis dalam dunia bisnis dapat mengambil kursus tentang kewirausahaan serta desain grafis sebagai kombinasi dua bidang tersebut.

Hal ini membantu meningkatkan kemampuan adaptabilitas dan pemahaman multidimensi bagi para mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja yang semakin kompleks saat ini. Selain itu, fleksibilitas ini juga dapat memperluas wawasan dan perspektif mahasiswa, serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan minat khusus mereka. Jadi intinya, fleksibilitas mata kuliah dalam program MBKM ini memberikan kebebasan

kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah dari berbagai program studi yang berbeda. Mereka dapat menggabungkan bidang ilmu sesuai dengan minat dan kebutuhan pribadi mereka.

- b. Pengakuan kredit, yang dimana memungkinkan mahasiswa untuk mentransfer kredit yang telah mereka peroleh di satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, sehingga mahasiswa tersebut tidak perlu mengulang mata kuliah yang sudah pernah mereka ambil.

Pengakuan kredit sendiri merupakan suatu proses di mana mahasiswa dapat mengajukan pemindahan atau transfer kredit dari universitas asal ke universitas tujuan. Dengan adanya pengakuan kredit, mahasiswa dapat memperoleh manfaat seperti:

- 1) Efisiensi waktu dan biaya: Mahasiswa tidak perlu mengambil mata kuliah yang sudah mereka lakukan sebelumnya di universitas baru. Hal ini membantu dalam menghemat waktu studi dan biaya pendidikan.
- 2) Fleksibilitas pemilihan mata kuliah: Dengan adanya pengakuan kredit, mahasiswa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan mata kuliah yang ingin diambil sesuai minat dan kebutuhan akademik mereka.
- 3) Peningkatan mobilitas: Pengakuan kredit juga mendorong mobilitas antarperguruan tinggi karena para mahasiswa dapat dengan mudah pindah dari satu institusi ke institusi lain tanpa harus memulai dari awal.

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan sendiri terkait pengakuan kredit ini. Mereka biasanya akan melakukan evaluasi terhadap kurikulum serta capaian pembelajaran yang telah diperoleh oleh mahasiswa sebelumnya untuk

memastikan kesesuaian dengan kurikulum di perguruan tinggi yang dituju.

- c. Perkuliahan online, dalam pelaksanaan MBKM juga mendukung akses ke materi kuliah secara online untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang akan mengambil kursus di universitas lain yang mungkin tidak tersedia di perguruan tinggi mereka.

Regulasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi pilihan mata kuliah dan kurikulum dari universitas lain melalui platform pembelajaran online. Dengan adanya akses ke materi kuliah secara online, mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dengan mengambil kursus-kursus yang relevan dengan minat atau bidang studi tertentu.

Hal ini sangat bermanfaat karena memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan akademik mahasiswa. Mereka tidak hanya bergantung pada mata kuliah yang disediakan oleh perguruan tinggi tempat mereka berkuliah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menjelajahi opsi pendidikan tambahan dari institusi lain. Dalam era digital seperti sekarang ini, perkuliahan online menjadi alternatif efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi semua orang tanpa batasan geografis. Melalui MBKM, harapannya adalah bahwa lebih banyak mahasiswa dapat meraih potensi maksimalnya dengan mengakses sumber daya akademik dari berbagai institusi pendidikan.

Jadi intinya adalah pelaksanaan MBKM mendukung kemudahan akses mahasiswa terhadap materi kuliah secara online, sehingga mereka dapat mengambil kursus dari universitas lain yang tidak tersedia di perguruan tinggi tempat mereka kuliah. Ini memberikan

fleksibilitas dan peluang belajar yang lebih luas bagi mahasiswa.

Menurut Dekan Fakultas Adab dan Humaniora menjelaskan pada tanggal 9 September 2023 bahwa saat ini proses pembelajaran MBKM masih dilaksanakan secara daring, ada beberapa prodi yang telah melaksanakan MBKM dengan perguruan tinggi di luar UIN Raden Fatah. Hal yang sama diungkapkan oleh dekan fakultas Sainteks menjelaskan pada tanggal 9 September 2023 bahwa kegiatan pembelajaran dilakukan masih secara daring. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dekan Fakultas Dakwah pada tanggal 5 September 2023 bahwa proses pembelajaran MBKM pun dilaksanakan secara daring dan ini salah satu kemudahan untuk keberlanjutan program MBKM.

- d. Praktik kerja lapangan dan kewirausahaan, dalam pelaksanaan MBKM juga mendukung mahasiswa untuk menjalani magang, praktik kerja lapangan yang sudah ditentukan oleh pihak perguruan tinggi/prodi mereka sendiri.

MBKM ini adalah program yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri mereka di luar ruang kelas. Nah, salah satu aspek penting dari program ini adalah Praktik Kerja Lapangan dan Kewirausahaan. Dalam hal ini, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan magang atau praktik kerja lapangan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi atau prodi mereka sendiri. Artinya, setiap prodi mungkin memiliki persyaratan dan ketentuan tertentu terkait praktik kerja lapangan bagi mahasiswanya. Jadi intinya, MBKM mendukung upaya mahasiswa dalam memperoleh pengalaman nyata di dunia

kerja melalui praktik kerja lapangan serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan jiwa wirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Dakwah pada tanggal 5 September 2023 bahwa terkait dengan magang, ada beberapa mahasiswa yang telah melaksanakan magang di lembaga-lembaga konseling, hal ini juga bagian dari pelaksanaan MBKM yang ada di fakultas Dakwah. Selain itu juga Dekan Fakultas Adab dan Humaniora pada tanggal 9 September 2023 menjelaskan bahwa pelaksanaan MBKM sudah diterapkan selain dengan antar perguruan tinggi pada praktik magang pun sudah diterapkan di museum-museum untuk menulis isi naskah.

Dalam pelaksanaan MBKM ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian antara Pengguna dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Syarat dan Ketentuan ini mengatur tentang pemakaian layanan Kampus Merdeka. Pengguna disarankan untuk membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum. Dengan Pengguna mengunjungi, mendaftar, dan/atau menggunakan Kampus Merdeka, Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa Pengguna telah membaca dengan teliti, memahami, dan menerima seluruh Syarat dan Ketentuan tanpa terkecuali.

Apabila Pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat dan Ketentuan, Pengguna

tidak diperkenankan untuk mengakses lebih lanjut dan dipersilakan untuk meninggalkan Kampus Merdeka.

a. Informasi Umum

- 1) Kampus Merdeka merupakan sarana yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal.
- 2) Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 1 semester di luar program studi serta 2 semester diluar kampus tetapi tetap didalam prodi yang sama.
- 3) Kampus Merdeka memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu terhadap dugaan indikasi penyalahgunaan dan/atau pelanggaran aturan di Kampus Merdeka, mulai dari melakukan moderasi, menghentikan layanan dan menutup akun tanpa pemberitahuan atau informasi kepada pemilik akun tersebut.

b. Pengguna

- 1) Pengguna situs Kampus Merdeka wajib mengisi akun data pribadi dengan lengkap dan jujur.
- 2) Pengguna situs Kampus Merdeka wajib mengisi nama dan email dengan benar dan melakukan verifikasi.

- 3) Pengguna situs Kampus Merdeka harus bertanggung jawab atas keamanan akun pribadinya, termasuk penggunaan email dan password.
- 4) Setiap pengguna situs Kampus Merdeka hanya diperbolehkan memiliki satu akun aktif dan khusus untuk mahasiswa dan dosen wajib terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- 5) Pengguna situs Kampus Merdeka dapat mengisi data pribadi mereka untuk kepentingan program di Kampus Merdeka.
- 6) Penggunaan layanan atau fitur apapun yang disediakan oleh Kampus Merdeka menunjukkan bahwa pengguna sudah mengerti dan menyetujui semua aturan yang diberlakukan oleh Kampus Merdeka.
- 7) Pengguna situs Kampus Merdeka dilarang keras untuk mengisi dan/atau menyebarkan konten maupun berkomunikasi dengan unsur SARA, penghinaan/pencemaran nama baik, diskriminasi, pornografi, menyudutkan pihak lain dan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
- 8) Pengguna situs Kampus Merdeka tidak diperkenankan menggunakan situs ini untuk melanggar peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan di Negara Republik Indonesia dan/atau di negara lain.
- 9) Pengguna situs Kampus Merdeka bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan ataupun dimasukkan ke dalam situs Kampus Merdeka dan Kampus Merdeka bertanggung jawab atas privasi informasi yang dimasukkan oleh pengguna.
- 10) Pihak Kampus Merdeka berhak untuk menyesuaikan dan menghapus informasi pengguna, bahkan

menonaktifkan akun pengguna yang melanggar aturan situs ini jika dianggap perlu.

- 11) Pengguna situs Kampus Merdeka berkewajiban untuk menghormati hak-hak pengguna lain dengan tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak lain tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
- 12) Pengguna situs Kampus Merdeka tidak diperbolehkan untuk mengirim spam email ke setiap bagian dari situs Kampus Merdeka.
- 13) Kampus Merdeka memiliki hak untuk memblokir akun yang melanggar aturan atau peraturan situs Kampus Merdeka.

c. Program Kegiatan

- 1) Peserta dari setiap Program Kegiatan yang diadakan oleh Kampus Merdeka wajib terdaftar sebagai pengguna situs Kampus Merdeka.
- 2) Pengguna yang terdaftar sebagai mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Sekolah dan Perguruan Tinggi dapat mengikuti seluruh Program Kegiatan yang ada di Kampus Merdeka sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan lainnya yang tertuang pada informasi kegiatan.
- 3) Pengguna yang terdaftar sebagai Mitra / Lembaga dapat melakukan penawaran program kegiatan yang sesuai dengan visi misi Kampus Merdeka dan juga termasuk salah satu dari delapan kategori kegiatan, yaitu:
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang / Praktik Kerja
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penulisan / Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha

- g. Studi / Proyek Independen
 - h. Membangun Desa / Kuliah Kerja Tematik
- 4) Kampus Merdeka berhak menolak penawaran program kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Proses Seleksi

- 1) Peserta yang telah mendaftar program kegiatan di situs Kampus Merdeka akan melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan dari masing-masing program.
- 2) Pada hari pengumuman, peserta akan mendapatkan info terkait status aplikasi di situs Kampus Merdeka dan juga notifikasi email dari Kampus Merdeka.
- 3) Masa pendaftaran dan hari pengumuman dapat berubah jika dibutuhkan.

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan dengan situs dan/atau Perjanjian ini akan diselesaikan secara eksklusif dalam yurisdiksi pengadilan Republik Indonesia dan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tujuan (program pertukaran pelajar luar negeri).

2. Domain Kepemimpinan

- 1. Pada Tingkat Institusi
 - a. Memastikan semua pemangku kepentingan memahami filosofi MBKM
 - b. Melakukan pemetaan kondisi eksisting terhadap pencapaian tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) MBKM dari delapan IKU yang ditetapkan pemerintah

- c. Merumuskan kebijakan dan regulasi perancangan, strategi pelaksanaan, dan penja minan mutu MBKM untuk mencapai tiga IKU dan sesuai dengan SN Dikti
 - d. Membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan MBKM (industri, regulator, KKN tematik, dan kegiatan lainnya sesuai dengan naturanya yang ada)
2. Pada Tingkat Penyelenggara Program Studi
- a. Memastikan bahwa CPL harus tetap dipenuhi
 - b. Memetakan transisi kurikulum yang konvensional menjadi kurikulum yang dapat memfasilitasi MBKM, khususnya berbagai mata kuliah yang dapat dilibatkan dalam MBKM, minimal meliputi:
 - 1) Melakukan analisis organisasi mata kuliah terhadap CPL prodi (Hasil Belajar, Bahan Menulis pembentuk mata kuliah, mata kuliah prasyarat)
 - 2) Menentukan mata kuliah unggulan prodi yang akan ditawarkan antar prodi dan/ atau antar PT untuk pelaksanaan MBKM
 - 3) Melakukan menulis mata kuliah yang dapat dikembangkan/dikuatkan lebih lanjut melalui kegiatan MBKM
 - 4) Menentukan jumlah sks yang akan disetarakan dengan kegiatan MBKM
 - 5) Melakukan menulis atau perumusan sistem konversi kegiatan MBKM ke dalam sks mata kuliah di program reguler
 - c. Menyiapkan prosedur operasi baku untuk:
 - 1) Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi sendiri atau Perguruan Tinggi lain

- 2) Memfasilitasi dan memberikan pengakuan sks bagi mahasiswa Perguruan Tinggi lain yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi di Perguruan Tinggi
- 3) Melakukan evaluasi dan meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM.

3. Domain Sumber Daya

- a. Menyusun alokasi anggaran untuk investasi infrastruktur dan/atau pelaksanaan MBKM
- b. Membentuk unit atau tim kerja untuk mengarahkan dan mengkoordinasi pelaksanaan MBKM.
- c. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan administrasi akademik agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan MBKM, khususnya sistem pengakuan aktivitas MBKM ke dalam sks pembelajaran yang konvensional
- d. Membangun, menyesuaikan dan/atau menyempurnakan Learning Management System (LMS) agar memiliki keterandalan yang tinggi untuk pelaksanaan aktivitas MBKM yang dilakukan secara daring.

4. Domain Penjamin Mutu

- a. Menyusun aturan dan pedoman etika dosen, praktisi, dan mahasiswa untuk mewujudkan pelaksanaan MBKM yang berkualitas.
- b. Menyusun manual mutu dan dokumen Prosedur Operasi Baku (POB) pelaksanaan MBKM.
- c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan atau peningkatan kualitas LMS dan teknologi pembelajaran yang digunakan.

- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan MBKM dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
- e. Menyesuaikan dan mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring umpan balik mahasiswa terhadap penyelenggaran MBKM

5. Kurikulum

Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah juga diturunkan melalui pedoman teknis pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. Ada 8 (delapan) program yang dipersiapkan oleh dalam mendukung konsep ini yaitu 1) Pertukaran pelajar, 2) Magang/Praktik Kerja, 3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, 4) Penulisan/Riset, 5) Proyek Kemanusiaan, 6) Kegiatan Wirausaha, 7) Studi/Proyek Independen, dan 8) Membangun Desa/KKN Tematik.

Kesemuanya ini didasari oleh filosofi yang sederhana tetapi sangat mendalam yaitu Belajar di Luar Prodi seperti Berenang di Lautan Lepas. Filosofi ini diibaratkan mahasiswa akan lebih adaptif dan kompetitif pada masa depan karena luasnya prodi hanya seluas kolam renang jika dibandingkan dengan dunia nyata seluas lautan yang ada di masyarakat.

Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi proses *link and match* antara dunia perguruan tinggi dengan dunia kerja. Konsep ini sebetulnya sudah pernah dicanangkan dulunya di Indonesia, tetapi sekarang diaktualkan kembali dengan berbagai perubahan.

Dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM, diantaranya sebagai berikut:

a. Tetap fokus pada pencapaian SKL/CPL

Dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dengan implementasi MBKM. Salah satu hal yang penting adalah tetap fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pada dasarnya, SKL atau CPL adalah tujuan akhir dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dengan mempertahankan fokus pada pencapaian SKL/CPL, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa mahasiswa benar-benar menguasai kompetensi yang relevan sesuai dengan bidang studi mereka.

Dalam konteks MBKM, fokus pada SKL/CPL menjadi lebih penting karena pendekatan ini menekankan kebebasan belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk merancang jalur belajarnya sendiri dan memilih mata kuliah serta aktivitas non-kelas yang sesuai dengan minat dan tujuan pribadi mereka.

Namun, meskipun ada kebebasan belajar yang lebih besar dalam MBKM, institusi pendidikan harus tetap memastikan bahwa setiap jalur belajar yang dipilih oleh mahasiswa masih mencakup kompetensi inti sesuai dengan SKL/CPL. Hal ini bertujuan agar lulusan tetap memiliki kualifikasi akademik yang layak dan mampu bersaing di dunia kerja.

Jadi intinya, walaupun MBKM memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam merencanakan jalur belajar mereka, tetap penting untuk menjaga fokus pada pencapaian SKL/CPL. Dengan demikian, pendidikan yang

diberikan masih terarah dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa serta tuntutan dunia kerja.

- b. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa tersebut mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL prodinya.

Hal ini berarti bahwa setiap mahasiswa harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pembelajaran secara maksimal selama tiga semester penuh. Dalam periode waktu ini, mereka diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan pemahaman serta keterampilan mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing.

Selain itu, melalui implementasi MBKM, mahasiswa juga diharapkan bisa mendapatkan pengalaman belajar tambahan yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dari program studi yang mereka ambil. Misalnya, jika seorang mahasiswa mengambil program studi Teknik Informatika, maka dia akan diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi tambahan seperti kecerdasan buatan atau pengembangan aplikasi mobile.

Tujuan utama dari semua ini adalah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara holistik. Melalui MBKM, harapannya adalah para mahasiswa dapat merasakan manfaat langsung dari proses pembelajaran dan siap menghadapi tantangan dunia kerja setelah lulus. Jadi, intinya dalam implementasi MBKM adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan hak belajar maksimum selama 3 semester dan juga pengalaman

belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dari program studi mereka.

- c. Dengan pelaksanaan MBKM ini mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Artinya, dalam MBKM, tidak hanya fokus pada pembelajaran di dalam kelas secara teoritis, tetapi juga melibatkan pengalaman praktis di lapangan yang relevan dengan bidang studi mahasiswa. Ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ilmu yang dipelajari dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata.

Melalui pelaksanaan MBKM ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan lapangan seperti magang, riset lapangan, kerja praktek, atau proyek-proyek komunitas. Dengan demikian, mereka bisa belajar dari pengalaman langsung dan mengembangkan keterampilan praktis serta kemampuan problem-solving.

Hal ini membantu para mahasiswa untuk mempersiapkan diri lebih baik ketika mereka lulus dari perguruan tinggi dan masuk ke dunia kerja sebenarnya. Mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan tuntutan pekerjaan di bidang studi mereka serta mampu beradaptasi dengan cepat. Jadi intinya adalah bahwa MBKM menawarkan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan bidang studi mereka. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis dan persiapan yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja setelah lulus.

- d. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).

Kurikulum MBKM harus dirancang dengan sifat yang fleksibel, artinya dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni). Hal ini penting karena IPTEKS selalu berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dengan memiliki kurikulum yang fleksibel, perguruan tinggi dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan kemajuan ilmiah terbaru.

Selain itu, kurikulum juga harus mampu beradaptasi dengan tuntutan bidang pekerjaan atau market signal. Perguruan tinggi perlu memperhatikan tren pekerjaan saat ini dan masa depan untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Kurikulum MBKM harus mencakup kompetensi-kompetensi yang relevan dengan permintaan pasar kerja sehingga lulusannya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.

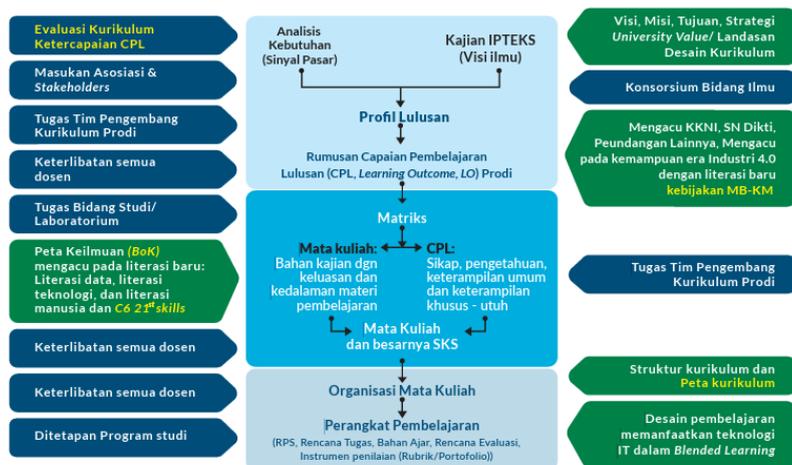
Dengan demikian, pengembangan dan implementasi kurikulum MBKM harus memperhatikan fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan IPTEKS serta adaptabilitas untuk menjawab tuntutan bidang pekerjaan. Dengan cara ini, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa kurikulum yang dijalankan tetap relevan, *up-to-date*, dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan.

6. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan profil lulusan, dan menulis-menulis yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (scientific vision) yang menghasilkan bahan menulis.

Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan (CPL), mata kuliah beserta bobot SKS nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matriks secara sederhana tahapan kurikulum terdiri dari:

- Penetapan profil lulusan dan perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- Penetapan bahan menulis dan pembentukan mata kuliah;
- Penyusunan matriks organisasi mata kuliah dan peta kurikulum.



7. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kesiapan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), sarana dan prasarana merupakan suatu fasilitas dan infrastruktur yang mendukung mahasiswa untuk

mengatur proses belajar mereka secara lebih fleksibel dan mandiri. Hal ini termasuk dalam akses ke platform pembelajaran digital perpustakaan yang memadai, ruang kolaborasi, serta dukungan teknologi dan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Konsep ini juga dapat memberikan kebebasan untuk mahasiswa dalam menentukan mata kuliah, jadwal, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

Selain itu, ruang kolaborasi juga menjadi salah satu fasilitas yang disediakan. Ruang ini memungkinkan mahasiswa untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim proyek, diskusi bersama dosen atau teman sekelas, serta berbagi ide-ide kreatif. Dengan adanya ruang kolaborasi ini, diharapkan tercipta suasana belajar yang interaktif dan saling mendukung antar mahasiswa.

Pentingnya dukungan teknologi dan internet yang memadai juga tidak bisa diabaikan. Teknologi seperti komputer/laptop serta akses internet stabil merupakan hal pokok agar mahasiswa dapat menjalankan pembelajaran jarak jauh dengan lancar. Tanpa dukungan teknologi dan internet yang memadai, proses belajar mandiri akan sulit dilakukan.

Konsep MBKM juga memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan mata kuliah, jadwal, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kontrol penuh dalam merancang jalur belajar mereka sendiri.

Dalam kesimpulannya, sarana dan prasarana dalam MBKM merupakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung mahasiswa untuk belajar secara fleksibel dan mandiri. Termasuk di dalamnya adalah akses ke platform pembelajaran digital perpustakaan yang memadai, ruang

kolaborasi, serta dukungan teknologi dan internet yang memadai untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Konsep ini memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan jalur belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.

8. Sumber Daya Manusia

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dirancang untuk menambah pengalaman dan pengetahuan melalui eksplorasi dan praktik di lapangan yang dilaksanakan satu hingga dua semester di luar kampus asal dari mahasiswa. Oleh karena itu, peserta kegiatan MBKM ini harus mempersiapkan diri dan ini menjadi berkesempatan yang baik dalam mendapat ilmu yang berkualitas dari mitra Kampus Merdeka sekaligus memperluas koneksi di luar kampus asal.

Perlu diketahui pula bahwa aktivitas selama mengikuti Kampus Merdeka juga dapat dikonversi menjadi SKS. Dalam prosesnya stakeholders yang ada harus mempersiapkan diri dalam proses pelaksanaannya, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, juga sumber daya manusia mitra dari kampus asal. Karena ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam prosesnya.

SDM Prodi menetapkan daftar rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah. Bagian ini ditentukan oleh SDM pada Prodi saat proses peninjauan kurikulum. CPL dinyatakan sebagai suatu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja selama mahasiswa menempuh pembelajaran di perguruan tinggi. Ditambahkannya bahwa beberapa referensi yang dapat digunakan dalam penyusunan

CPL yakni PermenristekDikti No. 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Panduan Penyusunan Capaian Penyusunan Lulusan Program Studi 2014, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016, Deskriptor KKNI, Dokumen Kurikulum Ulil Albab, rumusan pembelajaran dari forum program studi sejenis dan/atau lembaga sertifikasi/validasi/akreditasi internasional.

Selain CPL ada juga Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan menulis atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut

Berdasarkan paparan di atas bahwa Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan MBKM pada Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan kesiapan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sistem harus disiapkan termasuk para dosen dan tenaga pendidik, mahasiswa dan unsur lainnya, yang semua itu berperan penting dalam menyediakan bimbingan, dukungan, serta fasilitas bagi mahasiswa yang menjalani pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Sumber daya manusia harus memiliki pendekatan yang inklusif dan progresif mendorong kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, serta menghadirkan metode pembelajaran yang beragam dan responsif terhadap kebutuhan individu mahasiswa. Para dosen dan tenaga pendidik lainnya juga harus mendukung dan memberdayakan

mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka, termasuk memfasilitasi kemandirian belajar, mengenali bakat dan minat mahasiswa, serta memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian kurikulum. Sumber daya manusia berperan penting dalam MBKM sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu mahasiswa mencapai potensi maksimal mereka, sambil memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada mahasiswa dalam mengelola pendidikan.

9. Mahasiswa

Dalam kesiapan pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka, mahasiswa memiliki peran sentral. Mahasiswa dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengelola pendidikan mereka sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan yang mereka inginkan.

MBKM merupakan salah satu program Kampus Merdeka yang membuka kesempatan bagi mahasiswa/i untuk belajar mengembangkan potensi diri selama satu sampai dua semester melalui kegiatan di luar perkuliahan. Program MBKM menjadi ajang untuk mendapatkan *hardskills* dan *softskills* agar kelak bisa lebih matang ketika memasuki dunia kerja. Perlu diketahui bahwa program Magang Kampus Merdeka dapat diikuti seluruh mahasiswa/i dari PTN maupun PTS yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Selain itu, pendaftaran program magang berlaku bagi seluruh mahasiswa/i jenjang S1 dari semua jurusan dengan diikuti persetujuan dari Perguruan Tinggi masing-masing.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa sukses dalam pelaksanaannya, sesuai dengan apa

yang sudah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yakni berikut ini:

1. Pahami Minat

Mahasiswa dalam proses pelaksanaan MBKM harus bisa memahami minat dan bakat dalam diri masing-masing. MBKM menyediakan banyak posisi di berbagai bidang. Selain itu, tidak ada batasan posisi yang dapat kamu pilih terlepas dari latar belakang pendidikanmu. Meskipun demikian, penting untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan diri sekaligus hal profesional apa yang sekiranya dapat Mahasiswa lakukan dengan baik. Minat mahasiswa ini menjadi hal yang harus ada dan penting, sebagai bekal untuk bisa menjadikan mahasiswa menjadi lebih baik. Hal ini karena MBKM adalah program untuk menunjang persiapan karir sehingga perlu dipersiapkan secara matang agar berguna dalam membantu mahasiswa dalam meraih karir impian.

10. Hardskills dan Softskills

Jika minat dan tujuan sudah dipahami dengan baik maka akan cenderung timbul rasa untuk mengeksplorasi ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan untuk ahli dalam suatu bidang.

Ilmu dan keterampilan dalam bentuk *hardskill* dan *softskills* bisa didapat dan diasah melalui berbagai cara, seperti: kelas di kampus, seminar, kursus singkat (*short course*) *bootcamp*, juga bisa belajar otodidak. Semakin sering ilmu dan keterampilan diasah maka semakin besar pula peluang seseorang menjadi ahli di bidangnya. Hal ini yang kemudian dapat menjadi nilai yang bisa ditawarkan saat mendaftar magang.

Dalam hal ini, mahasiswa memiliki beberapa peran dan tanggung jawab diantaranya:

- a. Menentukan jalur belajar, dalam hal ini mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.
- b. Mengambil kendali belajar, mahasiswa diharapkan mengambil peran aktif dalam proses belajar mereka. Mahasiswa dalam hal ini harus berpartisipasi aktif dalam diskusi, Penulisan, dan proyek-proyek akademik, serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di kampus.
- c. Berpikir kritis dan mandiri, dalam hal ini mahasiswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri, mampu menganalisis, menilai, serta menyintesis informasi secara independent.
- d. Mengelola waktu dan tanggungjawab, dalam hal ini mahasiswa harus mampu mengatur waktu dengan baik dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah mereka ambil terkait dengan pendidikan.

11. Analisis

Analisis kebutuhan dan kesiapan sistem sangat penting dalam MBKM yang dapat membantu memastikan bahwa kegiatan MBKM ini dapat diterapkan dengan baik serta memberikan kebebasan dan peluang yang lebih besar bagi mahasiswa dalam mencapai tujuan akademik.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para mahasiswa serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil agar program MBKM dapat berjalan dengan baik. Dengan menganalisis kebutuhan, pihak terkait dapat

mengidentifikasi area-area di mana ada kesenjangan antara apa yang ditawarkan oleh program dengan harapan dan keinginan mahasiswa. Hal ini menjadi dasar untuk merancang solusi-solusi atau penyesuaian-penyesuaian tertentu guna meningkatkan efektivitas program.

Selain itu, analisis kesiapan sistem juga sangat vital. Ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, kurikulum, serta proses administratif yang ada di perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua komponen pendukung telah siap secara teknis maupun non-teknis sehingga pelaksanaan MBKM dapat berjalan lancar tanpa hambatan signifikan.

Dengan melakukan analisis kebutuhan dan kesiapan sistem secara menyeluruh sebelum implementasi MBKM, akan membantu meminimalkan risiko gangguan atau kendala selama penyelenggaraan program ini. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa program MBKM telah dipersiapkan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa.

Jadi, analisis kebutuhan dan kesiapan sistem sangat penting dalam memastikan suksesnya implementasi program MBKM serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk mencapai tujuan akademik mereka.

BAB III

STRATEGI IMPELMENTASI

A. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Stakeholder

Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti:

a. Komunikasi yang efektif

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), komunikasi yang efektif sangat penting. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam program tersebut, yang disebut sebagai stakeholder.

Komunikasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa pesan-pesan mengenai MBKM dapat diterima dengan baik oleh para stakeholder. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara tepat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta memperhatikan kebutuhan dan harapan dari setiap pihak yang terlibat.

Dengan adanya komunikasi yang jelas dan terbuka, diharapkan semua pihak dapat saling memahami tujuan serta manfaat dari program MBKM. Selain itu, komunikasi juga berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program agar tetap sesuai dengan ekspektasi stakeholder.

Pentingnya komunikasi efektif dalam pelaksanaan MBKM menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan semua pihak serta pemenuhan kebutuhan mereka melalui penyampaian informasi secara jelas dan terbuka. Dengan demikian, diharapkan kolaborasi antara universitas dan

stakeholders lainnya dapat berjalan lancar demi kesuksesan implementasi program MBKM.

b. Melibatkan stakeholder

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), terdapat kebutuhan untuk melibatkan stakeholder. Melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan dan menjalankan konsultasi secara reguler bertujuan untuk mendapatkan masukan dan umpan balik yang berharga.

Pertama-tama, penting bagi program MBKM untuk melibatkan stakeholder. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terkait dengan program ini, seperti mahasiswa, dosen, pejabat universitas, industri, dan masyarakat luas. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, program MBKM dapat memastikan bahwa berbagai sudut pandang dipertimbangkan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan harapan semua pihak.

Selain itu, menjalankan konsultasi secara reguler juga menjadi hal penting dalam mengimplementasikan MBKM. Dengan melakukan konsultasi rutin kepada stakeholder, baik melalui forum diskusi maupun pertemuan tertentu, kita dapat mengumpulkan ide-ide baru serta umpan balik tentang perkembangan program. Hal ini membuka ruang bagi partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan sehingga mereka merasa didengar dan dilibatkan dalam perjalanan MBKM.

Melalui kolaborasi antara penyelenggara program dengan para stakeholder tersebutlah akan memberikan manfaat besar bagi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Masukan dan umpan balik yang diberikan oleh stakeholders bisa menjadi sumber informasi

berharga dalam memperbaiki dan mengembangkan program ini agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, penting untuk melibatkan stakeholder dan menjalankan konsultasi secara reguler dalam pelaksanaan program MBKM. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan perspektif yang komprehensif serta meningkatkan kualitas program tersebut.

c. Menyediakan sumber daya

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), ada kebutuhan untuk menyediakan sumber daya yang memadai. Sumber daya ini diperlukan agar peserta program memiliki pemahaman yang cukup tentang topik yang dibahas.

Salah satu jenis sumber daya yang penting adalah literatur. Peserta perlu memiliki akses ke buku, jurnal ilmiah, artikel, atau materi bacaan lainnya yang terkait dengan topik pembelajaran mereka. Dengan adanya literatur ini, peserta dapat memperdalam pengetahuan mereka dan mengembangkan wawasan baru.

Selain itu, penting juga untuk memberikan akses kepada peserta untuk berinteraksi dengan ahli bidang terkait. Ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau diskusi langsung dengan para ahli di bidang tersebut. Interaksi langsung dengan ahli akan membantu peserta dalam mendapatkan informasi lebih lanjut, menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik mereka, serta mendapatkan perspektif dan pandangan dari sudut pandang praktisi di lapangan.

Secara keseluruhan, penyediaan sumber daya seperti literatur dan akses ke ahli bidang merupakan langkah penting dalam menjalankan program MBKM. Hal

ini akan membantu peserta menjadi lebih terampil dan kompeten dalam memahami topik-topik yang dibahas dalam program tersebut.

d. Mempertimbangkan kepentingan

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), penting bagi kita untuk mempertimbangkan kepentingan stakeholder. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka agar informasi yang disajikan dapat menjadi relevan dan menarik bagi mereka.

Dalam konteks ini, "stakeholder" merujuk pada berbagai pihak yang memiliki peranan atau keterlibatan dalam program MBKM, seperti mahasiswa, dosen, lembaga pendidikan, industri, masyarakat luas, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan kepentingan stakeholder tersebut, kita dapat menghasilkan informasi yang tidak hanya sesuai dengan harapan mereka tetapi juga menarik serta bermanfaat bagi mereka.

Misalnya, jika mahasiswa adalah salah satu stakeholder utama dalam program MBKM ini, maka penting untuk memahami apa yang diharapkan oleh para mahasiswa dari program tersebut. Mungkin ada harapan akan penawaran mata kuliah atau peluang Magang/Internship di industri tertentu. Oleh karena itu, penyampaian informasi tentang MBKM harus dilakukan dengan cara yang relevan dan menarik bagi para mahasiswa agar mereka tertarik untuk terlibat dalam program tersebut.

e. Evaluasi dan umpan balik

Pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Evaluasi dan umpan balik ini diperlukan agar

program dapat terus memantau dan mengevaluasi efektivitasnya, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran para stakeholder yang terlibat dalam program. Selain itu, melalui penerimaan umpan balik dari berbagai pihak, program juga dapat melakukan perbaikan lebih lanjut.

Dalam konteks MBKM, evaluasi menjadi penting untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kita bisa mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah memberikan manfaat yang diharapkan atau masih perlu penyesuaian. Evaluasi ini juga membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder seperti mahasiswa, dosen, maupun pihak pengambil kebijakan mengenai konsep dan implementasi MBKM.

Selain itu, mendapatkan umpan balik dari stakeholder sangatlah berharga. Menerima masukan dari mereka akan membantu identifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dalam pelaksanaan MBKM. Umpan balik ini bisa datang dari seluruh partisipan program termasuk mahasiswa peserta MBKM sendiri. Dengan bersifat terbuka menerima umpan balik tersebut, tim pelaksana MBKM dapat merespon dengan cepat atas tantangan-tantangan atau saran-saran yang diajukan oleh para stakeholders.

Jadi intinya adalah dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, evaluasi dan umpan balik sangat penting. Evaluasi membantu dalam mengukur efektivitas program dan meningkatkan pemahaman stakeholder, sedangkan umpan balik memungkinkan perbaikan yang lebih lanjut.

B. Memilih Kegiatan yang Sesuai dengan Kebutuhan Mahasiswa

Dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka, untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Melakukan survei langsung dengan mahasiswa

Pentingnya melakukan survei langsung dengan mahasiswa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Survei ini bertujuan untuk memahami kebutuhan, minat, dan aspirasi mahasiswa.

Dalam konteks MBKM, yang mengutamakan pendekatan personalisasi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa, survei langsung sangatlah penting. Dengan melakukan survei langsung kepada mahasiswa, pihak pengelola program dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai apa yang diinginkan oleh mahasiswa.

Survei ini akan membantu pihak pengelola program dalam merancang kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para mahasiswa. Dengan demikian, program MBKM dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi setiap individu.

Melalui survei langsung ini juga bisa ditemukan potensi-potensi khusus dari masing-masing mahasiswa serta aspirasi mereka terhadap perkembangan kampus. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kampus serta menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

Jadi intinya adalah bahwa melalui melakukan survei langsung kepada para mahasiswanya sendiri, pihak pengelola program MBKM dapat memperoleh

pemahaman mendalam tentang kebutuhan, minat, dan aspirasi mereka. Hal ini menjadi langkah awal untuk menyediakan lingkungan belajar yang sesuai bagi setiap individu serta meningkatkan kualitas pendidikan di kampus.

b. Mengidentifikasi tema atau topik

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), ada kebutuhan untuk mengidentifikasi tema atau topik yang sedang relevan dan menarik bagi mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa serta dapat meningkatkan kualitas *softskill* mereka.

Salah satu contoh tema atau topik yang bisa diangkat dalam MBKM adalah peningkatan *softskill*. *Softskill* merupakan kemampuan non-teknis yang penting dalam dunia kerja, seperti komunikasi efektif, kepemimpinan, kolaborasi tim, dan *problem solving*. Dengan mengadakan kegiatan yang berfokus pada pengembangan *softskill* ini, mahasiswa dapat memperoleh keterampilan tambahan yang akan bermanfaat dalam karier mereka di masa depan.

Selain itu, topik kewirausahaan juga menjadi pilihan menarik dalam MBKM. Melalui kegiatan-kegiatan terkait kewirausahaan, seperti *workshop* bisnis atau mentoring dari praktisi bisnis sukses, mahasiswa dapat belajar tentang konsep dasar bisnis, inovasi produk/jasa baru, manajemen usaha, serta cara mengembangkan ide-ide kreatif menjadi peluang bisnis yang nyata.

Tidak hanya itu saja, isu lingkungan juga merupakan topik relevan saat ini. Mahasiswa dapat diajak untuk terlibat dalam proyek-proyek pelestarian lingkungan

seperti kampanye pengurangan sampah plastik atau penanaman pohon sebagai upaya menjaga ekosistem alam. Ini tidak hanya mendukung kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan mengidentifikasi tema atau topik yang relevan dan menarik, program MBKM dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi mahasiswa. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan softskill, meningkatkan kewirausahaan, serta peduli terhadap isu lingkungan.

c. Menawarkan berbagai jenis kegiatan

Perlunya menawarkan berbagai jenis kegiatan dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberikan pilihan yang beragam bagi mahasiswa.

Program MBKM adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada mahasiswa dalam memilih mata kuliah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, serta mengembangkan keterampilan di luar kurikulum formal. Dalam rangka mencapai tujuan ini, penting untuk menyediakan berbagai jenis kegiatan yang menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat ditawarkan adalah seminar, di mana ahli atau pakar di bidang tertentu dapat memberikan wawasan tambahan kepada mahasiswa melalui presentasi dan diskusi interaktif. Pelatihan juga merupakan pilihan yang baik, karena dapat membantu meningkatkan keterampilan praktis seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, atau pengembangan diri.

Pertemuan diskusi bisa menjadi platform bagi mahasiswa untuk saling bertukar pendapat dan ide-ide dengan sesama mahasiswa maupun dosen. Diskusi semacam itu akan memperluas pemahaman mereka tentang topik tertentu dan mendorong kerjasama antara sesama anggota akademik.

Selain itu, penting juga untuk menyelenggarakan kegiatan sosial sebagai bagian dari program MBKM. Kegiatan sosial ini bisa mencakup misi kemanusiaan seperti pengabdian masyarakat atau kampanye kesadaran sosial lainnya. Ini akan membantu para mahasiswa memperluas wawasan mereka, meningkatkan empati, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Dengan menawarkan berbagai jenis kegiatan seperti seminar, pelatihan, pertemuan diskusi, atau kegiatan sosial dalam program MBKM, mahasiswa akan memiliki pilihan yang beragam untuk mengembangkan diri mereka di luar pembelajaran formal. Ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menyenangkan bagi para mahasiswa.

d. Mengevaluasi dan identifikasi serta kelemahan masing-masing

Pentingnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat memahami jenis kegiatan mana yang paling diminati oleh mahasiswa.

Dalam konteks MBKM, evaluasi sangat penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan program. Dengan mengevaluasi setiap

kegiatan, kita dapat melihat apa saja hal-hal positif yang dicapai dan apa saja kendala atau kesalahan yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

Evaluasi juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan program MBKM. Misalnya, jika suatu jenis kegiatan mendapatkan respon positif dan diminati oleh banyak mahasiswa, maka bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan jumlah atau kualitasnya di masa depan. Sebaliknya, jika ada aktivitas tertentu yang tidak begitu diminati atau memiliki masalah tertentu, maka bisa dilakukan perubahan strategi atau penyesuaian agar lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa.

Jadi intinya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan dalam MBKM, kita dapat memperoleh pemahaman tentang apa yang berhasil dilakukan dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Ini akan membantu meningkatkan kualitas program secara keseluruhan serta memberikan pengalaman belajar terbaik bagi para mahasiswa.

e. Pertimbangkan aspek kreatif dan inovatif

Dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), ada kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek kreatif dan inovatif. Hal ini berarti bahwa kita perlu memikirkan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya agar dapat menghadirkan kegiatan yang inovatif dan menarik.

Dalam konteks MBKM, penting untuk mencari cara-cara baru dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Misalnya, melibatkan teknologi terkini atau metode pengajaran yang interaktif dan menarik bagi mahasiswa. Dengan melakukan

pendekatan ini, diharapkan para mahasiswa akan lebih termotivasi dalam belajar dan merasa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Selain itu, juga dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi metode evaluasi yang kreatif dan inovatif. Misalnya, menggunakan proyek-proyek kelompok atau tugas-tugas praktis yang mendorong pemecahan masalah nyata atau kolaborasi antar mahasiswa.

Penting bagi lembaga pendidikan untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan pengalaman belajar yang unik bagi mahasiswanya. Dengan mempertimbangkan aspek kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan program MBKM, harapannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan potensi diri mahasiswa secara maksimal.

f. Memberikan fleksibilitas

Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menekankan pentingnya memberikan fleksibilitas dalam jadwal kegiatan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi.

Dalam konteks MBKM, program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengatur dan memilih mata kuliah serta aktivitas non-kuliah sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dengan adanya fleksibilitas dalam jadwal kegiatan, para mahasiswa dapat lebih leluasa dalam menyesuaikan waktu belajar mereka dengan komitmen lain yang dimiliki seperti pekerjaan paruh waktu, organisasi kemahasiswaan, atau tanggung jawab pribadi lainnya.

Tujuan dari memberikan fleksibilitas ini adalah agar semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi tanpa dibatasi oleh keterbatasan waktu. Dalam lingkungan kampus yang heterogen dengan beragam latar belakang mahasiswa, setiap individu memiliki perbedaan prioritas dan kesibukan masing-masing. Oleh karena itu, dengan menyediakan jadwal yang fleksibel, diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi mereka untuk aktif dalam program MBKM.

Melalui pemberian fleksibilitas ini juga diharapkan akan meningkatkan partisipasi mahasiswa secara luas dan merata. Mahasiswa dari segala jurusan dan tingkatan akademik dapat ikut serta tanpa harus khawatir tentang benturan jadwal atau konflik antara mata kuliah wajib dengan pilihan mereka dalam program MBKM.

Jadi, intinya adalah bahwa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), memberikan fleksibilitas dalam jadwal kegiatan sangat penting. Hal ini memungkinkan mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk berpartisipasi secara aktif dan optimal.

C. Menetapkan Pengawasan yang Memadai

Untuk menetapkan pengawasan dan teknologi, itu diperlukan identifikasi risiko, menetapkan tujuan pengawasan, merencanakan struktur pengawasan dengan sumber daya yang cukup, mempertimbangkan otoritas dan tanggungjawab, melakukan review dan evaluasi, serta selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

D. Menetapkan Standar Nasional yang Jelas

Untuk menetapkan standar nasional yang jelas dalam upaya mengatasi penghambat dalam pelaksanaan kesiapan merdeka belajar kampus merdeka ada beberapa langkah yang dapat diambil diantaranya:

- a. Konsultasi dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, dosen mahasiswa, pakar pendidikan, dan pemerintahan dalam proses menetapkan standar nasional yang jelas. konsultasi yang luas akan memastikan bahwa standar yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak terkait.
- b. Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari para ahli pendidikan dan perwakilan dari institusi pendidikan tinggi untuk merumuskan standar nasional yang jelas. kelompok kerja ini akan membahas tentang aspek teknis dan praktis dari konsep merdeka belajar.
- c. Menetapkan standar akademik yang relevan dan obyektif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam mencapai gelar akademik. Selain itu, menyusun sistem evaluasi yang memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka secara efektif dan mandiri.
- d. Menyusun panduan tentang bagaimana kurikulum dapat dirancang sedemikian rupa, sehingga memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan mata kuliah dan jalur belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka.
- e. Menetapkan standar teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi konsep merdeka belajar, termasuk akses internet platform pembelajaran, dan sumber daya lainnya.

- f. Mensosialisasikan standar nasional kepada seluruh perguruan tinggi dan memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep merdeka belajar kampus merdeka dan cara penerapannya.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada prinsipnya memiliki empat point penting yaitu kemudahan dalam pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi, kemudahan untuk menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan memberikan hak belajar mahasiswa di luar kampus, merupakan kebijakan yang reformatif, inovatif, di luar kebiasaan zona aman iklim pendidikan di Indonesia. Tujuannya agar pendidikan di Indonesia melakukan percepatan dalam peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari kualitas lembaga pendidikan sampai kualitas lulusan yang harus memiliki skill yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan berbagai pihak, sosialisasi yang intens, dan dukungan pemerintah agar problematika dan tantangan dalam pengimplementasian kebijakan ini dapat diminimalisir dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Hasanah U.). Dengan melakukan solusi-solusi tersebut, diharapkan program MBKM dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa dan perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Saipul. (2008). *“Metodologi Penulisan Pendidikan”*. Palembang: Grafika Telindo Pers.
- Aris Junaidi, d. (2020). *“Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,”* Jakarta: Kemendikbud.
- Deni Sopiansyah, D. (2022). "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM ".
- Fuadi, T. M., & Aswita, D. (2021). "MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM):BAGAIMANA PENERAPAN DAN KEDALA YANG DIHADAPI OLEH PERGURUAN TINGGI SWASTA DI ACEH". *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 604.
- Hasanah. (2022). *"Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Tantangan dan Prospek Kedepan"*.
- Hasanah, U. (n.d.). "Tantangan dan prospek kedepan. kedepan be. *jurnal pengajian islam*".
- Kemendikbud, D. D. (2020). *"Buku Panduan Pelayanan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka"*.
- Lathif, N., Garnasihd, Y., & kk. (2022). "IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN MBKM UNTUK MENCIPTAKAN KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS HUKUM YANG PROFESIONAL". *PALAR (Pakuan Law Review)*, 278.
- Mariati. (2021). *"Tantangan Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi"*.
- Moleong. (2009). *"Metode Penulisan Kualitatif"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya".
- Nofia, N. N. (2020). "ANALISIS TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN“MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA” PADA

PERGURUAN TINGGI ISLAM NEGERI DI INDONESIA". *PRODU: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 62.

- Pendidikan, P. S. (2022). "*Standar Nasional Pendidikan*".
- Penyusun, T. (2021). "*Pedoman MBKM*". Palembang: "
- Pohan, F. S. (2022). "DAMPAK PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS TRILOGI (STUDI KASUS: PRODI MANAJEMEN)". *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 313.
- Purwanto, Ngalim. (2011). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Puspitasari, R., & Nugroho, R. (2021). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR, KAMPUS MERDEKA FISIP UPN VETERAN JAWA TIMUR". *Dinamika Governance; Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 277.
- Sheila, N. Y. (2012). "Pengaruh StrukturKepemilikan Sebagai Mekanisme Coorprate Governance Terhadap Kinerja Perbankan". *Manajemen Universitas Marantha*, 11.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). "Merdeka Belajar Kampus Merdeka terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur". *JurnalBisnis, ManajemendanEkonomi*, 31.
- Sontani, J. &. (2018). "Sarana dan Prasarana Pembelajaran Sebagai FaktorDeterminan Terhadap Motivasi Belajar Siswa". *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*.

- Sudaryanto, Widayati, W., & Amalia, R. (2020). "Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Aplikasinya dalam Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia". *Kode Jurnal Bahasa*, 78-79.
- Sukidin, et, all. (2005). "*Metode Penulisan: Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penulisan*". Surabaya: Insan Cendikia.
- Surakarta, I. (2020). "*Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Surakarta*". Surakarta".
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). "KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA:SEBUAH MENULIS LITERATUR". *Research and Development Journal Of Education*, 185.
- Yuli Asmi Rozali, Novendawati Wahyu Sitasari, Sulis Mariyanti. "Kesiapan Dosen Menjalankan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Untuk Membentuk Mahasiswa Unggul Dalam Era Revolusi Industri 4.0"
- Yulius Laga, dkk "Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)"

GLOSARIUM

Belajar ialah sebuah proses mengubah perilaku baik berkenaan dengan pengetahuan, sikap maupun keterampilan dari adanya Latihan maupun pengalaman. (Nofia, 2020)

Implementasi Kurikulum Merdeka untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada Kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan.

Kampus Merdeka merupakan sarana yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa

Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

MBKM adalah sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan jalannya pembelajaran di perguruan tinggi.

Merdeka Belajar Kampus merdeka merupakan inovasi dibidang pendidikan yang bergerak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Adapun esensi dari kampus merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centeret Learning*).

Pendidikan ialah bagian terpenting pada kehidupannya manusia sebab haruslah bisa memberikan berbagai perubahan terhadap manusia yang mana salah satu perubahannya ialah pada strata sosial individu yakni hendaknya mereka bisa mengakses pendidikan yang sama dan sifatnya menyeluruh.

Softskill merupakan kemampuan non-teknis yang penting dalam dunia kerja, seperti komunikasi efektif , kepemimpinan, kolaborasi tim, dan *problem solving*.

Stakeholder adalah pihak atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, perusahaan, atau proyek. Stakeholder dapat berupa individu, komunitas, atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan bisnis

Standar Nasional Perguruan Tinggi Merupakan satuan standar yang meliputi standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, standar Penulisan yang berkaitan dengan sistem Penulisan pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI dan Standar pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah NKRI

INDEKS

E

efektif, 8, 9, 17, 20, 22, 23,
40, 63, 65, 69, 75
efektivitas, 61, 67, 71
efisien, 9, 15, 24

F

filosofi, 46, 49
filosofis, 31
fleksibel, 2, 16, 43, 53, 55,
74
fleksibilitas, 14, 23, 31, 38,
39, 40, 41, 50, 53, 58, 70,
73, 74

G

globalisasi, 10, 32

H

historis, 31, 33

I

infrastruktur, 19, 48, 54, 55,
61, 75
inovasi, 1, 2, 11, 17, 28, 57,
69
inovatif, 19, 43, 72, 73, 76
intensif, 6, 21
interaktif, 55, 70, 72

internasional, 10, 22, 33, 57

K

karakteristik, 1, 8, 27
kolaborasi, 28, 31, 55, 56,
63, 64, 69, 73, 75
kompetensi, 15, 16, 18, 19,
32, 36, 50, 51, 53, 56
komunitas, 52
kondusif, 16
konstruktif, 9
kontribusi, 33
kreativitas, 12, 17, 28, 57
kurikulum, 2, 3, 5, 12, 16,
18, 19, 20, 29, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 39, 40, 47, 49,
50, 53, 54, 56, 58, 61, 68,
70, 75

M

MBKM, 3, 5, 6, 7, 12, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 37, 38, 40, 41,
42, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 76, 79

P

pendidikan, 1, 3, 4, 5, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 19,

20, 21, 23, 25, 27, 30, 31,
36, 39, 40, 50, 51, 57, 58,
60, 66, 68, 69, 73, 74, 75,
76

perguruan tinggi, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29,
30, 32, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 49, 50, 52, 53,
56, 57, 61, 72, 75, 76

profesional, 10, 18, 19, 32,
59

profesionalisme, 16

R

reformatif, 76

relevan, 15, 16, 18, 20, 29,
31, 40, 50, 51, 52, 53, 66,
68, 69, 70, 76

S

sosialisasi, 5, 6, 21, 76
sosiologis, 31
stakeholder, 17, 21, 63, 64,
65, 66, 67

T

teknologi, 15, 16, 32, 36, 37,
48, 55, 56, 61, 72, 74, 75
teoritis, 52
toleransi, 32